
Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan

Saman Fajriansyah, Ika Chandriyanti

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat

Saman.fajriansyah.2d@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of economic growth, the provincial minimum wage (UMP), the open unemployment rate on the poverty level and which factors have the most dominant influence on the poverty level. The scope of this research took the area of South Kalimantan Province. The type of data used is secondary data obtained from literature sources and official data obtained from agencies related to this research which will be processed by multiple regression analysis and simultaneous and partial tests. The results of this study are economic growth, provincial minimum wages (UMP), the open unemployment rate simultaneously have a positive and significant effect on the poverty level and partially only economic growth has no effect on the poverty rate for other variables that affect the poverty level. The provincial minimum wage (UMP) is the most dominant factor affecting poverty levels.

Keywords: *Economic Growth, Provincial Minimum Wage (UMP), Open Unemployment Rate, Poverty Level.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi (UMP), tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan dan faktor mana yang berpengaruh paling dominan terhadap tingkat kemiskinan. Ruang lingkup penelitian ini mengambil wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan dan data resmi yang diperoleh dari instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian ini yang akan diolah dengan analisa regresi berganda dan uji simultan serta uji parsial. Hasil penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi (UMP), tingkat pengangguran terbuka secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan secara parsial hanya pertumbuhan ekonomi yang tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan untuk variabel lainnya berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Upah minimum provinsi (UMP) faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Kata Kunci: *Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP), Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan.*

PENDAHULUAN

Pilar penting suatu bangsa yaitu pembangunan ekonomi yang akan menompang pembangunan bidang-bidang lainnya karena jika pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil, maka bidang-bidang lainnya akan sangat terbantu seperti bidang politik, hukum, pertanian, pendidikan dan bidang lainnya. Rendahnya tingkat kemiskinan merupakan bukti bahwa negara tersebut berhasil mensejahterakan masyarakat hal tersebut akan berakibat kepada kesenjangan ekonomi dan social lainnya oleh karena itu kemiskinan merupakan titik pilar pembangunan ekonomi. Sehingga dapat dikatakan bahwa prioritas dari pembangunan adalah menghapus kemiskinan.

Persoalan ekonomi dan sosial yang menjadi pembahasan utama negara berkembang pada khususnya seperti Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Kedalaman dan keparahan kemiskinan harus menjadi perhatian oleh karena perlu kebijakan yang dapat terbebas dari dimensi kemiskinan. Upaya-upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara benar, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.

Penduduk miskin Indonesia berdasarkan provinsi pada tahun 2019 berjumlah sebesar 24785,87 ribu jiwa. Pada tiga tahun jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan tentu hal tersebut menjadi hal yang positif artinya pembangunan yang telah direncanakan sudah direalisasi dengan baik. BPS tercatat penduduk miskin Indonesia sebesar 9,22% pada September 2019. Faktor yang berasal dari rata-rata upah buruh per hari mengalami kenaikan mempengaruhi tingkat kemiskinan Indonesia, nilai tukar petani yang meningkat mencapai 103,88 pada September 2019 dan tingkat pengangguran yang menurun, serta Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan tetapi dengan total jumlah penduduk sebesar 269603,40 ribu jiwa pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi (BPS, 2020).

Kemiskinan adalah suatu keadaan seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan telah dilakukan dan menjadi hasilnya, angka kemiskinan pada setiap Provinsi di Indonesia telah berkurang namun berjalan lambat serta masih tergolong tinggi salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Selatan karena banyak masyarakat belum dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan :

Tabel 1
Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2015 - 2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)
2015	189,163	4.72
2016	184,160	4.52
2017	194,560	4.7
2018	189,033	4.54
2019	192,480	4.55

Sumber : Data diolah, Badan Pusat Statistik Prov. Kalimantan Selatan, 2020

Tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Kalimantan. Berdasarkan tabel 1 menunjukkan tren yang menurun sedikit demi sedikit persentase pada 5 tahun terakhir tetapi hal tersebut juga tetap menjadi perhatian pemerintah untuk membuat kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan terutama pada tahun 2020 sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dalam segala hal termasuk pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya.

Kemiskinan di Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan diakibatkan oleh berbagai faktor yaitu pertumbuhan ekonomi lambat, tingkat upah masih di bawah standar dan tingkat pengangguran tinggi. Adanya penurunan tingkat kemiskinan pada wilayah tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah membawa sebuah keberhasilan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai hasil pertumbuhan ke seluruh sektor usaha sangat diperlukan dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada 5 tahun terakhir Di tahun 2015-2017 mengalami kenaikan sebesar 1,46%. Namun, pada tahun 2017-2019 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan mengalami penurunan sebesar 1,21%.

Tingkat kemiskinan dipengaruhi salah satunya oleh standar upah minimum yang diterima masyarakat. Upah minimum paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM), sehingga diharapkan dapat menjamin memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarga dan mendorong peningkatan produktivitas kerja serta kesejahteraan buruh

(Sumarsono, 2003). Pada 5 tahun terakhir dari Tahun 2015 – 2019 angka UMP ini terus meningkat yaitu Rp. 1.870.000 ditahun 2015 peningkatan UMP terus meningkat hingga tahun 2019 yaitu Rp 2.651.781,-, UMP berlaku untuk semua pekerja yang ada di Kalimantan Selatan kenaikan UMP tersebut berdasarkan upah minimum tahun berjalan dikali inflasi yang dihitung dari periode September tahun berlalu hingga September tahun berjalan dikali pertumbuhan domestic bruto hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan hidup layak bagi masyarakat Kalsel. (BPS Kalsel, 2020).

Menurunkan tingkat kemiskinan salah satu upayanya adalah tidak adanya orang yang menganggur sehingga mereka memiliki penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika kebutuhan hidupnya terpenuhi maka masyarakat tidak akan miskin oleh karena itu pengaruh tingkat pengangguran sangat signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan sampai saat ini belum bisa untuk diatasi oleh pemerintah nasional pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya.

Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalsel mengalami kenaikan sebesar 0,65% yaitu sebesar 4,31% atau sebesar 91.730 jiwa hal ini antara lain dipengaruhi oleh naiknya jumlah angkatan kerja/ tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) karena diringi banyaknya para pelajar dan para sarjana yang baru lulus perguruan tinggi hal ini dikarenakan lulusan berizajah lebih cenderung pilih-pilih pekerjaan karena mereka merasa sudah memiliki ijazah pasti ekspektasi harus bekerja ditempat yang layak dengan gaji yang tinggi sesuai dengan aspirasi mereka biasanya bekerja disektor modern ataupun dikantor dibandingkan lulusan SMA ke bawah sedangkan jumlah lowongan pekerjaan di Kalsel cenderung menurun.

Pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas adalah : (1) Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan? (2) Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan? (3) Faktor apa yang lebih dominan dalam mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan?

Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan secara simultan dan parsial. (2) Untuk mengetahui faktor apa yang paling dominan mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.

KAJIAN PUSTAKA

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi yang dialami seseorang atau kelompok yang tidak mampu atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Sumedi dan Supadi, 2004). Kebutuhan hidup yang dimaksud disini adalah kesehatan, ibadah menurut agamanya, pendidikan, pendapatan yang tinggi, pekerjaan, dan standar hidup yang layak. Oleh karena itu, dalam hal memenuhi kebutuhan hidup seseorang harus mempunyai pekerjaan. Definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemiskinan absolut kemiskinan relatif.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat sering juga disebut sebagai proses kenaikan *Gross Domestic Product* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan

ekonomi. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari tolak ukur melalui tingkat PDRB daerah tersebut.

Upah Minimum Provinsi (UMP)

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan daerah atau merupakan standar minimum yang digunakan pengusaha atau pelaku industri dalam memberikan upah kepada pekerja. Kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut upah minimum provinsi.

Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merupakan pengangguran yang tercipta jumlah tenaga kerja yang melimpah lowongan pekerjaan tidak tersedia. Sehingga mengakibatkan banyak orang tidak mendapatkan pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena angkatan kerja tersebut belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal atau dikarenakan faktor malas mencari pekerjaan atau malas bekerja.

Penelitian Terdahulu

Seri Jefry A.W (2016) berjudul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1995 – 2014 menunjukkan hasil variabel pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan variabel investasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan tetapi secara bersama-sama/serentak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Khairil Ihsan, Ikhsan, S.E, M.A (2018) yang berjudul Analisis Pengaruh UMP, Inflasi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh menunjukkan hasil UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Inflasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan pengangguran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara bersama-sama/serentak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.

Penelitian terdahulu dari Patryano G Anggara tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara yang memperoleh hasil penelitian bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan Hasil Pengujian menunjukkan variable Pengangguran bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

METODE

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Selatan, baik secara individu maupun bersama. Penelitian ini hanya mencakup pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dan kuantitatif. Pengaruh dari variabel-variabel yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Selatan. Data yang digunakan merupakan data runtun waktu (*time series*) tahunan. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh data *time series* tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi (UMP), dan tingkat pengangguran.

Sampel adalah bagian dari suatu objek atau subjek yang mewakili populasi. Oleh karena itu, pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah data *time series* tahun 2005 - 2019 yaitu data tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi serta tingkat

pengangguran Selatan selama 15 Tahun dari tahun 2005 – 2019 di Provinsi Kalimantan Selatan sehingga jumlah sampel yaitu sebanyak 15 sampel.

Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Berikut definisi operasional pada setiap variabel-variabel yaitu Variabel Dependen adalah tingkat kemiskinan yaitu satuan persen penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan, Variabel Independen (X_1) adalah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dilihat dari persentase pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun atas dasar harga konstan (%), Variabel Independen (X_2) yaitu upah minimum provinsi adalah besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diukur dalam satuan rupiah (Rp) dan Variabel Independen (X_3) yaitu tingkat pengangguran diperoleh dari prosentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja atau tingkat pengangguran terbuka (%).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi data dalam penyusunan ini adalah dokumentasi yaitu dengan menyalin data-data dari instansi dan literatur yang terkait dan ada hubungannya dengan masalah ini.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik dan uji statistik. Analisis deskriptif yaitu statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti sebagaimana adanya yaitu variabel tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi dan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan dan analisis Regresi Linier Berganda Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor dari variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Upah Minimum Provinsi (X_2), dan Tingkat Pengangguran (X_3) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut adalah model regresinya :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu$$

Regresi model logaritma terjadi karena perbedaan satuan dan besaran variabel bebas dalam persamaan. Hal tersebut seiring dengan pendapat (Imam Gozali, 2005) yaitu pemilihan model logaritma natural adalah mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas dan mendekati skala data serta untuk menghindari terjadinya heterokedstisitas. Sehingga Model logaritma yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk logaritma natural :

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \mu$$

Keterangan :

\ln = Logaritma Natural

Y = Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan (%)

X_1 = Pertumbuhan Ekonomi (%)

X_2 = Upah Minimum Provinsi (Rp)

X_3 = Tingkat Pengangguran (%)

B_0 = Konstanta

B_1, B_2, B_3 = Koefisien Regresi

μ = Variabel pengganggu

HASIL DAN ANALISIS

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Keadaan Geografis

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman hayati melimpah. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk asli maupun para perantau untuk mengembangkan wilayahnya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah Pulau Kalimantan bagian selatan. Seiring perkembangan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan, saat ini secara administrasi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 37.280,39 km² yang terbagi habis ke dalam 13 kabupaten/kota dengan rincian 152 kecamatan dan 2.008 desa/kelurahan dengan pusat pemerintahan yang sekaligus merupakan ibukota yakni Kota Banjarmasin.

Penduduk

Tabel 2
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
	Laki-Laki	Perempuan	
2015	2,021,963	1,967,830	3,989,793
2016	2,056,078	1,999,401	4,055,479
2017	2,089,422	2,030,372	4,119,794
2018	2,121,999	2,060,696	4,182,695
2019	2,153,738	2,090,358	4,244,096

Sumber: *Data diolah, Badan Pusat Statistik Prov. Kalimantan Selatan, 2020*

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan hasil Proyeksi penduduk tercatat sebesar 3.989.793 jiwa pada tahun 2015 berdasarkan jenis kelamin laki – laki berjumlah 2.021.963 jiwa dan perempuan berjumlah 1.967.830. Pada lima tahun terakhir jumlah penduduk terus mengalami kenaikan yang mana data terakhir pada tahun 2019 tercatat jumlah penduduk sebanyak 4.244.096 jiwa dengan jenis kelamin laki – laki berjumlah 2.153.738 dan perempuan berjumlah 2.090.358.

Karakteristik Deskripsi Variabel

Tingkat Kemiskinan

Tabel 3
Klasifikasi Variabel Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2019

No	Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)
1	2005	7.23
2	2006	8.32
3	2007	7.01
4	2008	6.48
5	2009	5.12
6	2010	5.21
7	2011	5.29
8	2012	5.01
9	2013	4.76
10	2014	4.81
11	2015	4.72
12	2016	4.52
13	2017	4.7
14	2018	4.54
15	2019	4.55

Sumber: *Data diolah, Badan Pusat Statistik Prov. Kalimantan Selatan, 2020*

Dari tabel 3 diatas dari tahun 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan di provinsi Kalsel mengalami penurunan secara fluktuatif. Tetapi angka kemiskinan di Kalsel masih perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan tingkat kemiskinan paling tinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 8,32% dan paling rendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 4,52%.

Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 4
Klasifikasi Variabel Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalsel Tahun 2015 - 2019

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2005	5.06
2	2006	4.98
3	2007	6.01
4	2008	6.45
5	2009	5.29
6	2010	5.59
7	2011	6.97
8	2012	5.97
9	2013	5.33
10	2014	4.84
11	2015	3.83
12	2016	4.38
13	2017	5.28
14	2018	5.12
15	2019	4.08

Sumber : Data diolah, Badan Pusat Statistik Prov. Kalimantan Selatan, 2020

Dari data diatas dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan cenderung mengalami penurunan secara fluktuatif dari 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tahun 2019 tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,08% turun sebesar 1,04% dari tahun 2018 sebesar 5,12% hal tersebut menjadi perhatian untuk membuat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya dengan menurunkan angka kemiskinan di provinsi Kalimantan Selatan.

Upah Minimum Provinsi (UMP)

Tabel 5
Klasifikasi Variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) Di Provinsi Kalsel Tahun 2015 -2019

No	Tahun	Upah Minimum Provinsi (UMP) (Rp)
1	2005	536,300
2	2006	629,000
3	2007	745,000
4	2008	825,000
5	2009	930,000
6	2010	1,024,500
7	2011	1,126,000
8	2012	1,225,000
9	2013	1,337,500
10	2014	1,620,000
11	2015	1,870,000
12	2016	2,085,050
13	2017	2,258,000
14	2018	2,454,671
15	2019	2,651,781

Sumber : Data diolah, Badan Pusat Statistik Prov. Kalimantan Selatan, 2020

Upah minimum provinsi disini adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan daerah dari tabel di atas dari tahun 2005 s/d 2019 upah minimum Prov. Kalsel terus mengalami kenaikan hal tersebut di dukung meningkatkan kebutuhan hidup masyarakat. Selama 5 tahun terakhir upah minimum provinsi dari tahun 2015 ke 2019 terus mengalami kenaikan yang mana pada tahun 2016 UMP sebesar Rp. 1.870.000,- naik menjadi Rp. 2.651.781,- dengan kenaikan sebesar Rp. 781.781,- hal tersebut merupakan kebijakan yang sangat baik karena dengan naiknya kebutuhan hidup para masyarakat oleh karena itu harus diiringi dengan kenaikan upah para pekerja sehingga akan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang akan menjadi kan keluarga sejahtera.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka yang dimaksud disini adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dari tahun 2015 s/d 2019 di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebagai berikut :

Tabel 6
Klasifikasi Variabel Tingkat Pengangguran Di Provinsi Kalsel Tahun 2015 – 2019

No	Tahun	Tingkat Pengangguran (%)
1	2005	7.34
2	2006	8.87
3	2007	7.62
4	2008	6.18
5	2009	6.36
6	2010	5.25
7	2011	6.15
8	2012	5.14
9	2013	3.66
10	2014	3.8
11	2015	4.92
12	2016	5.45
13	2017	4.77
14	2018	4.5
15	2019	4.31

Sumber : *Data diolah, Badan Pusat Statistik Prov. Kalimantan Selatan, 2020*

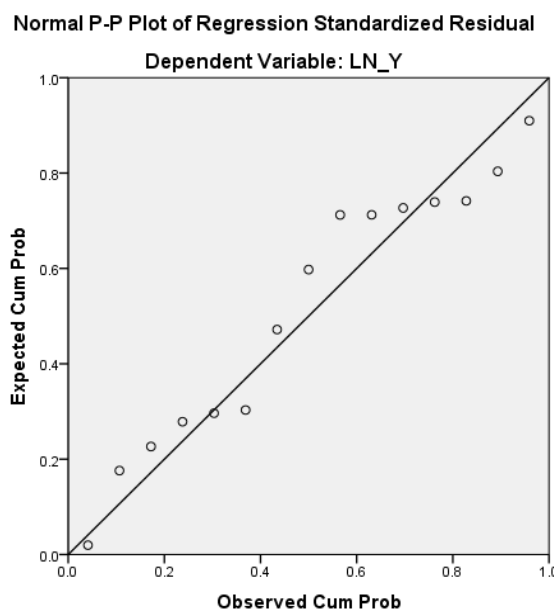
Dari tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan secara fluktuatif. Tetapi angka pengangguran di Kalsel masih perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menanggulangi pengangguran yang mana dari data di atas tingkat Pengangguran paling tinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 8,87% hal ini juga seiring dengan naiknya tingkat kemiskinan sedangkan sebaliknya untuk tingkat pengangguran paling rendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 3,66%. Tetapi dari 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan yang signifikan yang mana pada tahun 2019 menunjukkan Tingkat Pengangguran sebesar 4,31% hal ini merupakan capaian terbaik pemerintah dalam menanggulangi pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan salah satunya dengan menambah lapangan kerja dan menanggulangi kemiskinan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dari hasil uji normalitas menunjukkan titik menyebar dan mengikuti pada sekitar garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas

Gambar 1 Hasil Uji Normalitas



Uji Multikolinearitas

Pada uji Multikolinearitas menunjukkan nilai R^2 mendekati angka 1 yang ditunjukkan R-square dan nilai VIF tidak ada yang > dari 10 dan tolerance value tidak ada dibawah 0,10 pada tiga variable hal ini menyatakan terbebas dari Multikolinearitas.

Tabel 7
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	CollinearityStatistic	
	Tolerance	VIF
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	0,736	1.359
UMP X2	0,323	3.092
TPT X3	0,389	2.569

Sumber : Hasil data diolah, 2020

Uji Autokorelasi

Pada Uji autokorelasi menunjukkan tidak terjadi korelasi dengan pembuktian yaitu nilai Durbin Watson 1.579. Syarat bebas autokorelasi jika $dU < DW < 4-dU$. Berdasarkan data diatas diperoleh nilai dU sebesar 1,7501 dan $4-dU$ sebesar 2,2499, maka $1,7501 < 1,579 < 2,2499$.

Tabel 8
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.929 ^a	.863	.825	.08221	1.579

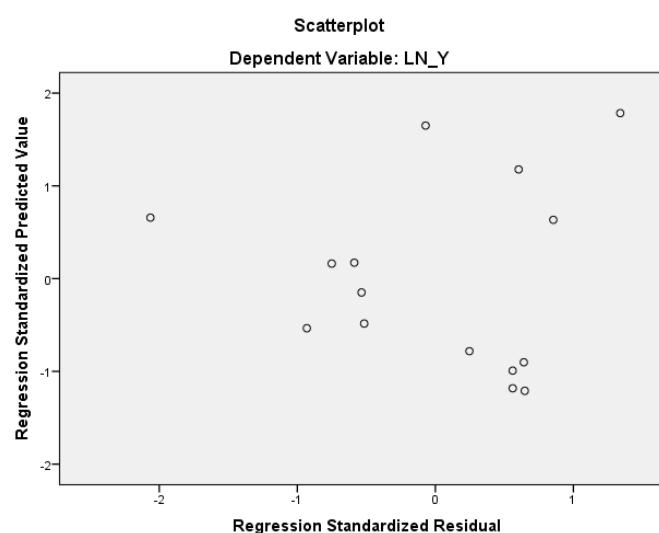
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020 SPSS

Berdasarkan tabel 8 nilai Durbin Watson sebesar 1.579. Syarat tidak terjadi autokorelasi jika $dU < DW < 4-dU$. Dengan data 15 time series dan 3 variabel independen, diketahui nilai dU sebesar 1,7501 dan $4-dU$ sebesar 2,2499, maka $1,7501 < 1,579 < 2,2499$. Sehingga dapat diambil kesimpulan tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dengan melihat pola grafik scatter plot dengan ketentuan jika tidak ada pola yang jelas atau acak menunjukkan terbebas dari heteroskedastisitas berdasarkan hasil uji dibawah ini maka terbebas dari heteroskedastisitas.

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Analisis Regresi Linier Berganda

hasil perhitungan dari masing-masing variabel Pada hasil uji regresi linier berganda diperoleh penelitian sebagai berikut :

Tabel 9
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	t-hitung	Sig/Prob	Keterangan
Konstanta	4.664	3.388	0.006	
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	-0.119	-0.753	0.467	Tidak Signifikan
UMP (X2)	-0.237	-3.119	0.010	Signifikan
TPT (X3)	0.319	2.301	0.042	Signifikan
T _{tabel} = 1,753			F _{hitung} = 23,017	
R = 0,929			F _{tabel} = 3,29	
R-Square = 0,863			SIG F = 0,000	

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2020, SPSS

Model analisis regresi linier berganda bentuk logaritma natural (LN) dan dimasukkan pada persamaan sebagai berikut :

$$\ln Y = 4,664 - 0,119 \ln X_1 - 0,237 \ln X_2 + 0,319 \ln X_3 + \mu$$

Berdasarkan persamaan regresi linear diatas berikut penjelasan sebagai berikut :

1. Konstanta = 4,664
Jika pertumbuhan ekonmi, upah minimum provinsi dan Tingkat Pengangguran dianggap sama dengan nol, maka variabel Tingkat Kemiskinan sebesar 4,664.
2. Koefisien Pertumbuhan Ekonomi (X1)
Jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 1 persen, dan upah minimum provinsi dan Tingkat Pengangguran dianggap tetap, maka tidak akan berpengaruh terhadap kemiskinan karena variable bebas tidak ada pengaruh terhadap variable tak bebas.
3. Koefisien Upah Minimum Provinsi (UMP) (X2)
Jika upah minimum provinsi mengalami kenaikan sebesar 1 persen, dan pertumbuhan ekonomi dan Tingkat Pengangguran dianggap tetap, maka akan mengakibatkan penurunan Tingkat Kemiskinan sebesar 0,237 persen.
4. Koefisien Tingkat Pengangguran (X3)
Jika variabel Tingkat Pengangguran mengalami kenaikan sebesar 1 persen, dan pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi dianggap tetap, maka akan mengakibatkan kenaikan Tingkat Kemiskinan sebesar 0,319.

Dari hasil regresi di atas menunjukkan besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi (UMP), dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan dari nilai R Square (R²) diperoleh sebesar 0.863 artinya 86,3% pengaruh variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sedangkan sisanya 13,7% dipengaruhi oleh variabel lain tidak ada pada penelitian ini.

Uji Pengujian hipotesis secara simultan dengan uji F. Hal ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan. Pada hasil regresi menunjukkan pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan pada F-Tabel sebesar 3.29 ($\alpha = 5\%$ dan $df_1 = 3, df_2 = 15$), sedangkan F-Hitung sebesar 23.017 dengan probabilitas F-statistik 0,000. Nilai F-Hitung sebesar 23.017 lebih besar dari F-Tabel 3.29 dan tingkat signifikan sebesar 0,05 (α) probabilitasnya sebesar 0,000 lebih kecil, maka disimpulkan Ho ditolak, yang berarti pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X1) terhadap Tingkat Kemiskinan.

Variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan dari hasil uji T nilai t-hitung sebesar -0,753 dan signifikansi t sebesar 0,467. Pada signifikansi (α) 0,05 dan df sebesar 15, sehingga diperoleh nilai t-tabel sebesar 1.753 hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan sehingga hipotesis dalam penelitian ini tidak terbukti dapat dijelaskan pertumbuhan ekonomi tersebut belum efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan tersebut menunjukkan kualitas pertumbuhan ekonomi masih tidak mampu dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi (X2) terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan dengan nilai t-hitung sebesar -3.119 dan signifikansi t sebesar 0,010. Dengan menggunakan signifikansi (α) 0,05 dan df (*degree of freedom*) sebesar 15, maka diperoleh nilai t-tabel sebesar -1.753. Maka diperoleh t-hitung (-3.119) < t-tabel (-1.753) menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan artinya semakin meningkat upah minimum provinsi maka Tingkat Kemiskinan akan semakin rendah.

Pengaruh Tingkat Pengangguran (X3) terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel Tingkat Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan dengan hasil t-hitung sebesar 2.301 dengan signifikansi t sebesar 0,000. Dengan menggunakan signifikansi (α) 0,05 dan df sebesar 15, maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 1.753. Sehingga diperoleh t-hitung (2.301) > t-tabel (1.753) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan artinya dengan lapangan pekerjaan yang lebih banyak maka seseorang tidak akan menganggur sehingga menghasilkan pendapatan yang mana hal tersebut akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga akan menurunkan tingkat kemiskinan atau sebaliknya dengan tidak tersedianya lapangan pekerjaan maka menyebabkan masyarakat tidak memiliki pendapatan sehingga mengakibatkan peningkatan kemiskinan.

Faktor yang Dominan Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan.

Faktor yang dominan mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan dari hasil penelitian ini adapun variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran adalah variabel upah minimum provinsi (X3) karena nilai T hitung variabel upah minimum provinsi (UMP) lebih besar yang diperoleh t-hitung (-3.119) < t-tabel (1.753) dibandingkan dengan nilai T hitung variabel lainnya dan tingkat probabilitas 0,010 lebih kecil dari variabel lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka menyatakan bahwa variabel Upah Minimum Provinsi (X3) adalah faktor yang paling dominan.

PENUTUP

Implikasi Penelitian

Implikasi dari hasil penelitian ini menghasilkan bahwa variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Prov. Kalsel yaitu Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, Upah Minimum Provinsi hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Keterbatasan Penelitian

Dalam hal ini, peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki dalam penyusunan naskah maupun dalam pencarian atau pengolahan data yaitu data dari dinas terkait tidak lengkap seperti gambaran umum tentang Kalimantan Selatan dan juga

dari beberapa variabel yang digunakan hanya terdapat data 15 tahun kebelakang sehingga data yang di ambil hanya 15 tahun kebelakang.

Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat adalah (1) Secara simultan variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Upah Minimum Provinsi (UMP) (X_2), dan Tingkat Pengangguran (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) di Provinsi Kalimantan Selatan. (2) Secara Parsial variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi untuk variabel Upah Minimum Provinsi (X_2), dan Tingkat Pengangguran (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) di Provinsi Kalimantan Selatan. (3) Upah Minimum Provinsi (X_3) adalah faktor yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Saran

Saran yang dikemukakan adalah (1) Pemerintah perlu membuat program program sosial dan kebijakan yang berdampak signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan. (2) Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan peningkatan SDM melalui pelatihan keterampilan sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja lokal atau pendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, P. G. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah*, Program Studi Ilmu Ekonomi, Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
- BPS. (2020, November 28). *Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia*. Retrieved from <http://bps.go.id>
- BPS. (2020, November 28). *Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan*. Retrieved from <http://kalsel.bps.go.id>
- Gani Irwan, S. (2015). *Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hidayat, W. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan di Jawa Timur*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ikhsan, K. (2018). Analisis Pengaruh Ump, Inflasi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Vol. 3 No. 3 Agustus 2018 : 408-419*, Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- RPJMD. (2016-2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan.
- Seri Jefri, A. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, Dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1995 – 2014 (Skripsi). *Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*.
- Sumarsono, S. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu Yogyakarta.
- Sumedi, S. d. (2004). Kemiskinan di Indonesia : Suatu Fenomena Ekonomi. *Icaserd Working Paper Pusat Penelitian Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Departemen Pertanian*, 21.

- Todaro, M. (2000). *Economic Development, Six Edition*. Harlow: Addison-Wesley.
- Umar, H. (2007). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yanti, N. (2011, 28 Agustus). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1999 - 2009*. Retrieved from <http://repository.upnyk.ac.id/1662>